

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 8.374 responden tenaga kerja muda berusia 18 hingga 30 tahun menggunakan data Sakernas 2023, penelitian ini menemukan bahwa 38,32 persen responden merupakan penerima Program Kartu Prakerja. Profil penerima program didominasi oleh kelompok berpendidikan menengah keatas ( $\geq$  SMA), wirausaha, telah menikah, serta tinggal di wilayah pedesaan. Selain itu, proporsi penerima program sedikit lebih tinggi pada perempuan (40,84%) dibandingkan laki-laki (36,44%). Menariknya, tenaga kerja muda yang aktif mencari kerja atau mempersiapkan usaha justru memiliki peluang lebih rendah untuk menjadi penerima program dibandingkan mereka yang tidak aktif mencari kerja.

Hasil estimasi regresi logistik biner menunjukkan bahwa model signifikan secara statistik dengan nilai  $Prob > \chi^2 = 0,000$ , yang berarti variabel independenn secara bersama-sama memengaruhi peluang tenaga kerja muda menerima Program Kartu Prakerja. Dari tujuh variabel independenn yang diuji, enam diantaranya berpengaruh signifikan, dengan partisipasi pelatihan muncul sebagai faktor paling dominan (*odds ratio* = 2,099). Ukuran dominasi tersebut didasarkan pada nilai *odds ratio*, yang secara metodologis menunjukkan seberapa besar peluang seseorang menerima program meningkat ketika variabel tersebut berubah. Hasil tabulasi silang memperkuat temuan ini, dimana 47,30 persen penerima program berasal dari kelompok yang pernah mengikuti pelatihan, jauh lebih tinggi dibanding 25,48 persen dari kelompok yang tidak pernah mengikuti pelatihan. Konsistensi antara hasil regresi dan tabulasi silang tersebut menegaskan bahwa keikutsertaan dalam pelatihan memiliki pengaruh paling besar terhadap peluang penerimaan Program Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan karakteristik demografis dalam memengaruhi peluang penerimaan program. Ukuran “pengaruh yang lebih besar” ini didasarkan pada perbandingan nilai *odds ratio* yang

signifikan serta distribusi tabulasi silang antar variabel. Variabel sosial ekonomi seperti pendidikan, status pekerjaan, dan status perkawinan memiliki nilai *odds ratio* di atas 1 dan *p-value*  $< 0,05$ , menandakan peningkatan peluang penerimaan program. Misalnya, berdasarkan tabulasi silang, 40,10 persen tenaga kerja berpendidikan SMA keatas menerima program dibandingkan 15,11 persen yang berpendidikan di bawah SMA, sedangkan 39,42 persen pekerja formal menerima program dibanding 16,85 persen pekerja informal. Sebaliknya, faktor demografis seperti jenis kelamin tidak signifikan ( $p>0,05$ ), dengan perbedaan distribusi penerimaan yang relatif kecil antara laki-laki (36,44 persen) dan perempuan (40,84 persen). Dengan demikian, secara empiris dapat disimpulkan bahwa karakteristik sosial ekonomi lebih berpengaruh secara empiris terhadap peluang tenaga kerja muda menerima Program Kartu Prakerja, sedangkan faktor demografis bersifat inklusif dan tidak menimbulkan perbedaan peluang antar jenis kelamin.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap peluang penerimaan Program Kartu Prakerja. Hal ini menandakan bahwa program telah bersifat inklusif gender dan memberikan kesempatan yang relatif setara bagi laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, pemerintah perlu memastikan kesetaraan tersebut juga tercermin dalam hasil pelatihan, dengan memantau perbedaan tingkat penyelesaian dan manfaat ekonomi antara peserta laki-laki dan perempuan.

Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peluang penerimaan Program Kartu Prakerja. Tenaga kerja muda berpendidikan menengah keatas memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk diterima dibandingkan yang berpendidikan rendah. Oleh karena itu, pemerintah disarankan memperluas akses bagi kelompok berpendidikan rendah melalui pelatihan berbasis komunitas, modul sederhana, serta pendampingan digital agar kesenjangan literasi dan akses informasi dapat dikurangi.

Status pekerjaan juga memengaruhi peluang penerimaan program. Tenaga kerja muda yang sudah bekerja, terutama wirausaha, cenderung lebih mudah

diterima dibandingkan yang belum bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa program lebih banyak dimanfaatkan untuk pengembangan keterampilan (*upskilling*) daripada penciptaan kesempatan kerja baru. Pemerintah perlu menyeimbangkan kembali sasaran agar kelompok pengangguran dan pencari kerja turut memperoleh akses yang proporsional terhadap program.

Status perkawinan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Program Kartu Prakerja. Tenaga kerja muda yang sudah menikah memiliki peluang lebih tinggi untuk diterima karena dorongan tanggung jawab ekonomi rumah tangga. Namun, untuk mewujudkan keadilan *geneRational*, pemerintah perlu memperluas jangkauan sosialisasi kepada tenaga kerja muda yang belum menikah, terutama mereka yang baru memasuki pasar kerja, melalui kampanye digital dan lembaga pendidikan.

Daerah tempat tinggal atau domisili juga memiliki pengaruh signifikan. Menariknya, tenaga kerja muda yang tinggal di pedesaan memiliki peluang lebih tinggi untuk menerima program dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Hal ini menunjukkan keberhasilan perluasan akses digital di pedesaan. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa peningkatan akses tersebut diikuti oleh peningkatan kualitas hasil pelatihan melalui penguatan infrastruktur internet, perangkat pelatihan, dan ekosistem usaha lokal.

Keikutsertaan dalam pelatihan sebelumnya juga memiliki pengaruh positif terhadap peluang penerimaan program. Tenaga kerja muda yang sudah pernah mengikuti pelatihan memiliki kemungkinan lebih besar diterima karena orientasi belajar mereka yang tinggi. Untuk meningkatkan inklusivitas, pemerintah perlu mendorong partisipasi dari kelompok yang belum pernah mengikuti pelatihan dengan memperluas sosialisasi, memperbanyak pelatihan modular, serta mengembangkan format pembelajaran fleksibel yang dapat disesuaikan dengan waktu dan kemampuan peserta.

Aktivitas mencari kerja dan mempersiapkan usaha berpengaruh negatif terhadap peluang penerimaan program. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sasaran program dan kebutuhan kelompok yang sebenarnya membutuhkan dukungan untuk memasuki pasar kerja. Oleh karena itu,

pemerintah disarankan untuk meninjau kembali mekanisme seleksi agar lebih berpihak pada kelompok pencari kerja aktif dan calon wirausaha, melalui sistem kuota khusus, penyederhanaan pendaftaran, serta pendampingan berbasis komunitas.

Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data untuk menilai efektivitas Program Kartu Prakerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi dengan metode eksperimental atau *quasi-eksperimental* dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat tentang dampak program. Penelitian selanjutnya juga perlu memasukkan variabel seperti literasi digital, motivasi, dan jaringan sosial untuk memahami mekanisme partisipasi secara lebih mendalam. Dengan sinergi antara kebijakan publik, lembaga pelatihan, dan partisipasi aktif tenaga kerja muda, Program Kartu Prakerja dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di era ekonomi digital.

